Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah

Nanang Suparman*, Dina Fitra Sulistia**, Syamsir ***, Engkus****

****Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Diterima Agustus 2019; Disetujui Oktober 2019; Dipublikasikan Desember 2019

Abstrak

Kemajuan koperasi di Jawa Barat pada umumnya masih stagnan dan jalan ditempat belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah, produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja, berwirausaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembinaan dan pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yakni dengan penjabaran, menjelaskan dan memvalidasikan temuan penelitian, dengan sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris peranan pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan aspek diklat, permodalan, manajemen dan action research yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat belum optimal. Dikarenakan program tidak berjalan secara simultan yakni minimnya kegiatan diklat, minimnya bantuan manajerial dan fasilitas permodalan serta tidak adanya riset khusus untuk koperasi sehingga tidak dapat dianalisis lebih dalam pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi saat ini

Kata kunci : Peranan, Pembinaan, Dinas Koperasi

Abstract

The progress of cooperatives in West Java in general is still stagnant and the road in place has not contributed to regional economic development optimally, national products, increased exports, expanded employment opportunities, entrepreneurship, as well as increased and equitable distribution of income. The purpose of this study was to determine the role of coaching and achievement of the Office of Cooperatives and Small Business in West Java Province. This research method uses descriptive qualitative methodology, namely by elaborating, explaining and validating research findings, with primary and secondary data sources relating to the situation and empirical conditions of the role of fostering the Department of Cooperatives and Small Business in West Java Province. Data collection techniques with observation, in-depth interviews and documentation studies. The results showed that the training aspects of training, capital, management and action research conducted by the Office of Cooperatives and Small Business in West Java Province were not optimal. Because the program does not run simultaneously, namely the lack of training activities, the lack of managerial assistance and capital facilities and the absence of specific research for cooperatives so that it cannot be analyzed more in guidance that suits the needs.

Keywords : Role, Coaching, Cooperative Service

How to Cite : Suparman, N., dkk. (2019). Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah, 7 (2) : 58-70

*Corresponding author:
E-mail: n.suparman69@gmail.com

P-ISSN-2549-9165
e-ISSN -2580-2011

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai sokoguru dan bagian integral dalam perekonomian nasional, maka peranannya sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian rakyat. Namun demikian, masih dirasakan kurangnya respon dari berbagai pihak dalam memajukan dan mengembangkan koperasi walaupun payung hukum pemerintah tersedia.

Eksistensi koperasi berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yaitu meliputi sumber daya ekonomi yang

dimiliki oleh organisasi dan juga keadilan sosial ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan (Nasution & Thamrin, 2016).

Permasalahan koperasi secara umum meliputi lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola, kurangnya daya dukung permodalan, kesulitan pemasaran, praktek rentenir, gagap teknologi, kurangnya inovasi, kuantitas dan kualitas produk rendah. (Suparman., N., Chandra, D., Sari, A., 2019)

Adapun permasalahan yang terjadi pada operasional koperasi di Jawa Barat terlihat pada tabel. 1 berikut ini:

Tabel 1. Permasalahan Koperasi di Jawa Barat

No	Jenis	Masalah
1.	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya kesadaran 2. Lemahnya partisipasi 3. Lemahnya kedisiplinan 4. Lemahnya jiwa kewirausahaan 5. Lemahnya keterampilan 6. Lemahnya pendidikan dan teknologi 7. Adanya kepentingan pribadi
2.	Permodalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulitnya sumber dana 2. Adanya hambatan struktural dalam pengusaan faktor produksi 3. Kurangnya inovasi dalam memperbanyak produk koperasi
3.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya sistem manajemen koperasi 2. Lemahnya modernisasi 3. Lemahnya kemandirian koperasi 4. Kurangnya pemasaran 5. Sulitnya jaringan usaha dan perijinannya 6. Koperasi belum mampu bertahan dalam berkompetisi dengan perbankan 7. Sulitnya proses dalam mendirikan koperasi 8. Sulitnya merekrut anggota

Sumber :Dinas koperasi Jawa Barat, 2018

Dampak permasalahan koperasi yang tidak kunjung menemui jalan keluar mengakibatkan beberapa koperasi mengalami kevakuman operasional dan tidak ada rencana aksi selanjutnya dari para pengurus.

Tabel 2. Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif

No	Keterangan	Aktif	Tidak Aktif
1.	Koperasi Primer	242	649
2.	Koperasi Sekunder	29	11
	Total	271	660

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2018

Peranan Pemda Jabar dalam mengatasi permasalahan tersebut merumuskan program pemberdayaan koperasi dan mengimplementasikannya dalam kerangka manajemen berbasis mutu. Program Pendidikan dan pelatihan SDM koperasi menjadi salah satu prioritasnya. Menurut Soejono S & Sulistyowati, B. (2013) peranan mencakup :

1) Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang di dalam kehidupan kemasyarakatan.

“.....yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat didalamnya”. Lestari, M. P., & Nugroho, R. A. (2018).

2) Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Perilaku yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Dengan demikian perlu peran individu dan organisasi untuk menopang pembinaan yang berbasis kinerja (Deding Ishak, Dedeng Yusuf Maolani, 2017).

Penulis mengambil teori Hamalik dan Thoha sebagai acuan pembinaan serta strategi pembinaan yang baik seperti apa, dengan demikian penulis dapat mengukur bagaimana peranan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kepada koperasi di Jawa Barat. Adapun untuk mencapai pembinaan yang baik diperlukan strategi pembinaan guna mencapai hasil yang

inginkan. Strategi pembinaan terdiri dari:

1) Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Pelatihan adalah suatu proses yang di dalamnya meliputi serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk upaya pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional pelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu yang berguna meningkatkan efektivitas serta produktifitas tenaga kerja (Oemar Hamalik, 2011).

2) Penekanan pada Manajemen

Suatu sistem manajemen dalam koperasi sangat perlu diperhatikan, karena menyangkut pengelolaan usaha tersebut sehingga dapat menghasilkan pencapaian-pencapaian yang diinginkan.

3) Aspek Permodalan

Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa terdapat hubungan antara tingkat penguasaan penguasaan modal dengan hubungan tingkat pemanfaatan hasil pembangunan. Dengan akses lebih besar terhadap modal, koperasi diharapkan dapat menikmati perolehan

pembangunan (Anoraga, P., & Widiyanti, N. 1993).

4) *Action Research*

Suatu organisasi tidak akan pernah luput dari sebuah masalah, oleh karena itu untuk tercapainya sebuah pencapaian yang diinginkan, perlu adanya pendekatan untuk memecahkan masalah yang terjadi, oleh karena perlu dilakukan penelitian dan analisis sehingga suatu masalah dapat dipecahkan dengan menarik benang merah penyebab permasalahan yang terjadi, lalu dilakukan tindakan-tindakan guna memecahkan masalah yang ada.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembinaan koperasi di Provinsi Jawa Barat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif, tujuannya untuk memberikan kejelasan makna dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif mensyaratkan penulis untuk mengawali kajian dengan berfikir induktif, yaitu mengungkapkan berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan (Sugiyono, 2018). menganalisis serta berusaha melakukan teorisasi berdasarkan hal yang diamati. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang diarahkan berfikir induktif untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan akhirnya menjadi jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian (Burhanudin, 2006).

1. Informan Kunci (*Key Person*), yang memiliki data dan bersedia

memberikan data yang benar-benar relevan, kompeten, serta menguasai permasalahan.

2. Informan Biasa

Yakni penulis mencari informasi tambahan melalui koperasi-koperasi yang dibina oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang berada di kota Bandung.

Tabel 3. Data Informan

Nama	Alasan
Ismayanti Ratna Dewi S.E (Bidang Kelembagaan Koperasi)	Berkaitan dengan program pembinaan koperasi, peranan dinas terhadap koperasi yang dibinanya, serta faktor penghambat dalam pembinaan kepada koperasi.
Dra. Meini Rosita (Bidang Pemberdayaan Koperasi)	Berkaitan dengan program pembinaan koperasi, peranan dinas terhadap koperasi yang dibinanya, serta faktor penghambat dalam pembinaan kepada koperasi.
Dra. Dian Lismadani (Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi)	Berkaitan dengan program pembinaan koperasi, peranan dinas terhadap koperasi yang dibinanya, serta faktor penghambat dalam pembinaan kepada koperasi.
Ir. Ani Wicahya (UPTD Badiklatkop Jabar) Koperasi yang di Bina. (Kepala Koperasi.)	Berkaitan dengan program pembinaan koperasi, peranan UPTD terhadap koperasi yang dibinanya, serta faktor penghambat dalam pembinaan kepada koperasi.
Heni Hendayani (Verifikator BP2D)	Berkaitan dengan peranan dinas dalam pembinaan koperasi. Berkaitan dengan penelitian dan pengembangan koperasi di Jawa Barat

3. Dokumen

Sebagai sumber data lain yang sifatnya melengkapi data utama yang

relevan antara lain data dokumentasi, bisa berupa peraturan-peraturan, aturan-aturan formal, arsip dan berita

surat kabar yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipan, melalui pengamatan langsung ke lapangan yakni di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, UPTD Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklatkop) serta koperasi yang berada di kota Bandung.

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan dalam pelaksanaan pembinaan. Sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki (Anggara, 2015).

Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala- gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu peranan dan pembinaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pokok, Fungsi, Tujuan, dan Sasaran Dinas KUK Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2010)

Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah meliputi badan hukum koperasi, izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha kecil dan pengembangan usaha kecil yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi.
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi.
3. Penyelenggaraan administrasi dinas
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas, dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (Peraturan Gubernur No 53 Tahun 2011)

Tujuan: Kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi kedua Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yaitu “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan” dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha kecil
3. Perkuatan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Dengan demikian pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPN) di tingkat pelaksana (Engkus, 2018).

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Dalam upaya pencapaian suatu keberhasilan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkualitas, diperlukan adanya bimbingan oleh orang yang profesional dalam bidangnya, sehingga menciptakan hasil yang baik dalam suatu pekerjaan atau tugas. Selain itu ada unsur terpenting dalam pelaksanaan pelatihan dan

pendidikan, yang terdiri dari pertama, unsur manusia yang terdiri dari pengelola diklat, tenaga pelatih (Widyaiswara), peserta pelatihan, masyarakat, konsultan dan tenaga ahli pendidikan. Kedua, unsur materiil. Ketiga, unsur finansial dan Keempat, dukungan kondisi lingkungan organisasi. Selain itu perlu juga diperhatikan intensitas pembinaan ,....kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM kepada koperasi-koperasi juga menjadi hambatan, (Lestari & Kholil, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan tersebut, bahwa pembinaan tentang pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelayanan Dinas Terpadu (UPTD) Badan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (Badiklatkop) adalah terdiri dari empat pelatihan yang dilakukan:

- a) Pelatihan bagi pengelola koperasi
- b) Pelatihan uji kompetensi bagi manajer koperasi
- c) Pelatihan uji kompetensi bagi kasir dan juru buku koperasi
- d) Pelatihan *e-commerce* untuk pengelola koperasi

Tabel 4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi

Nama Kegiatan	Materi
<p>Pelatihan Perkoperasian bagi pengurus, pengelola, dan anggota koperasi se -Jawa Barat. Kegiatan peningkatan kapasitas sdm usaha kecil (DAK) tahun 2019.</p> <p>Katagori : Pengembangan Usaha</p> <p>(Kelas/Angkatan:8/18)</p> <p>(16-18 Juli 2018)</p>	<p>1) Ceramah Kebijakan pemberdayaan koperasi,</p> <p>2) Ceramah Peran dan fungsi jaringan Koperasi</p> <p>3) Dapatkan program pemerintah</p> <p>4) Membangun ekosistem bisnis</p> <p>5) Nilai-nilai dan prinsip koperasi,</p> <p>6) Pemahaman tentang perkoperasian,</p> <p>7) Organisasi dan manajemen koperasi,</p> <p>8) Anggota dan partisipasi anggota</p> <p>9) Usaha koperasi,</p> <p>10) Permodalan koperasi</p> <p>11) Post test dan evaluasi.</p>

Sumber : Badiklatkop Jawa Barat, 2018

Selanjutnya dalam unsur penunjang pendidikan dan pelatihan diperlukan empat unsur (Oemar Hamalik, 2011) yakni :

1. Unsur Manusia

Para pengelola diklat terdiri dari tenaga pelatih (Widyaiswara), peserta pelatihan, masyarakat, konsultan dan tenaga ahli pendidikan. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelayanan Dinas Terpadu (UPTD) Badan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (Badiklatkop) memberikan pembinaan melalui tenaga-tenaga yang professional serta ahli di bidangnya yakni Widyaiswara, yang sudah mempunyai standar sertifikasi kompetensi ahli dibidangnya (BNSP).

Tenaga instruktur profesional sebagai pemberi materi yakni

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.

Hal tersebut sesuai dengan teori menurut (Oemar Hamalik, 2011), tahap ke 4 dari 4 tahap bahwa pelaksanaan pelatihan bertujuan untuk mendidik dan melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pengembangan (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2018).

2. Unsur Materiil

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelayanan Dinas Terpadu (UPTD) Badan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (Badiklatkop) mempunyai sarana dan

prasarana yang baik yaitu dengan adanya kelas-kelas untuk pelatihan di balai, aula, memberikan makan, serta memberikan sertifikat jika berhasil lulus dalam uji kompetensi.

3. Unsur Finansial

Unit Pelayanan Dinas Terpadu (UPTD) Badan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (Badiklatkop) mempunyai anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat langsung, tanpa melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat dan disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan. Untuk peserta diklat koperasi diberikan penggantian biaya transportasi sebesar Rp. 300.000.

4. Dukungan Lingkungan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelayanan Dinas Terpadu (UPTD) Badan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (Badiklatkop) mendapatkan partisipasi yang baik dari peserta atau masyarakat serta pemerintah dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan. Meskipun dalam melakukan pelatihan memang terdapat banyak manfaat, akan tetapi terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan hasil wawancara dan penelitian lapangan berikut

Tabel 5. Kelemahan Pelaksanaan Diklat di Badiklatkop

Katagori	Keterangan
Peserta Diklat	Hanya Badiklatkop yang berhak untuk mengundang koperasi tertentu untuk mengirimkan delegasinya, sedangkan kebutuhan tiap koperasi masih belum dipastikan apa sesuai dengan yang diberikan oleh Badiklatkop.
Partisipasi Anggota Koperasi atau Peserta Diklat	Partisipasi dari anggota atau pengurus koperasi perlu ditingkatkan, mengingat masih ada koperasi yang mangkir dari pelatihan dengan berbagai macam alasan.
Sumber Daya Manusia (Tenaga Badiklatkop)	Terdapat kekurangan tenaga sumber daya manusia di Badiklatkop, dikarenakan banyak PNS yang pensiun, dan perekrutan PNS yang lama. Sehingga hanya ada beberapa pegawai yang ada, bahkan pegawai yang tersisa sudah berumur (hampir pensiun).

Penekanan Pada Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan tersebut, Program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dinas telah terlaksana, dalam hal ini sesuai dengan fungsi manajemen, karena program yang dibuat dan dijalankan mempunyai SOM (Standar Operasional Manajemen). Dapat kita lihat dalam hasil penelitian program-program yang dibuat tiap bidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan sumber daya manusia koperasi dalam hal manajemen sudah baik yakni menyentuh aspek perencanaan dengan adanya bagian perencanaan sebelum membuat program dan melaksanakan berbagai

bentuk program, seperti penyuluhan, bintek, advokasi, sosialisasi, bimbingan untuk koperasi yang membutuhkan bantuan, menegur sampai memanggil koperasi yang bermasalah baik untuk anggota dan pengurus koperasi.

Sesuai dengan yang dikemukakan bahwa "Manajemen adalah keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan itu, maka kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan dalam fungsi-fungsi perencanaan, pergerakan, pengorganisasian, koordinasi, supervisi, pemantauan, ketenagaan dan penilaian serta kepemimpinan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu"(O Hamalik, 2011).

Tabel 6. Peranan Dinas dalam Penekanan pada Manajemen

Program yang dilaksanakan	Peranan Dinas (Pembinaan)
Bidang Kelembagaan Koperasi: 1. Konsolidasi Koperasi Jawa Barat atau Hari jadi Koperasi (Harkop) 2. Bimbingan teknis laporan keuangan 3. Penyusunan dokumen LFA 4. Pendampingan Manajemen Kop 5. Akreditasi Koperasi 6. Temu konsultasi BH 7. Bintek pengurus & anggota Kop 8. Advokasi pendirian Kop 9. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Koperasi	1. Memberikan ruang konsultasi bagi yang ingin mendirikan koperasi 2. Memberikan bantuan software akuntansi dan komputer untuk tiap sekolah.

<p>Bidang Pemberdayaan Koperasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis penanganan khusus bagi Koperasi 2. Pengembangan jaringan usaha koperasi keluar Provinsi 3. Bimbingan teknis pengembangan usaha koperasi 4. Advokasi penguatan usaha koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) 5. Bimbingan teknis pengawasan koperasi usaha simpan pinjam 6. Workshop penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ruang konsultasi bagi koperasi 2. Menyediakan kredit seperti KUR dibank BRI, BTN, Mandiri. 3. Menyediakan bantuan non bank seperti hibah uang (UMi dan LPDB) dan hibah non uang. 4. Membantu memperluas jaringan usaha koperasi dengan ditampilkan melalui pameran event-event besar. 5. Membantu kerjasama dengan pengusaha lain
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ruang konsultasi bagi koperasi 2. Membuat Satgas yang terdiri dari IKOPIN, Dekopinwil, Polda untuk mengatasi koperasi yang bermasalah.
<p>Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Koperasi 2. Identifikasi dan Verifikasi Koperasi bermasalah. 3. Cabang dan Pembubaran Koperasi 4. Monitoring dan Evaluasi pengawasan dan pemeriksaan Koperasi Usaha Simpan Pinjam 5. Monitoring dan evaluasi bagi koperasi dan usaha kecil anggota koperasi. 6. Best Practice pengawasan dan penilaian koperasi usaha simpan pinjam. 	

Aspek Permodalan

Dari hasil wawancara yang dilakukan di tiap bidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yakni, dapat disimpulkan untuk aspek permodalan yang dibantu oleh pemerintah yang telah terlaksana saat ini adalah menyediakan kebijakan-

kebijakan, pelatihan dan hibah non uang seperti komputer, program aplikasi akuntansi dan sebagainya.

Namun untuk sekarang dibolehkan hanya hibah uang, karena bisa menjadi aset jika suatu saat koperasi tersebut tidak berjalan. Untuk hibah terbagi dalam dua bagian, yakni

hibah bank dan non bank, hibah bank berbentuk kredit seperti dana KUR. Koperasi dapat mengajukan kredit ke bank dengan dibantu subsidi oleh pemerintah sebesar 7% melalui bank. Untuk hibah non bank, bisa melalui LPDB atau UMi, sistem pendaftarannya melalui online nanti diverifikasi (RKPD online) dan biasanya akan mendapat NIK sebagai bentuk kelayakan mendapat hibah.

“.....Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempermudah akses agar mampu mengembangkan usahanya melalui fasilitasi perkuatan permodalan dan untuk memperlancar dan memperluas akses kepada sumber daya produktif kepada lembaga perbankan, non perbankan, program dana bergulir,...”(Susilawaty, I. & RFS, 2014).

Tabel 7. Peranan Dinas KUK dalam Permodalan

No	Sumber Modal Koperasi	Peranan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat dalam Permodalan
1.	Modal Sendiri : 1. Simpanan pokok 2. Simpanan wajib 3. Dana Cadangan 4. Hibah Modal Pinjaman : 1. Anggota koperasi 2. Koperasi lainnya atau anggotanya 3. Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang 5. Sumber lain yang sah	1. Memberikan bantuan hibah non uang (memberikan fasilitas diklat untuk pengembangan sdm, memberikan hibah komputer, memberikan program aplikasi akuntansi) 2. Memberikan kredit melalui bank yang telah direkomendasikan (memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank BRI, BTN dan Mandiri. 3. Memberikan hibah uang saja (tahun sekarang, dikarenakan ada peraturan baru sehingga belum ada realisasi).
2.		

Action Research (Litbang koperasi)

Action research adalah istilah untuk menamakan suatu riset yang diikuti dengan suatu tindakan pelaksanaan dari hasil-hasil yang disebutkan dalam riset tersebut

Model yang dapat diterapkan dalam *action research* adalah identifikasi masalah, konsultasi dengan ahli ilmu perilaku, pengumpulan data dan diagnose awal oleh konsultan, umpan balik kepada klien atau kelompok, diagnose bersama terhadap masalah, tindakan (Toha, 2003)(*action*), pengumpulan data setelah fase tindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan tersebut, bahwa tentang *action research* (litbang) ini penulis tidak mendapatkan hasil. Karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai *action research* seperti litbang atau riset, bertolak belakang dengan pendapat di dinas yang mengatakan bahwa untuk litbang terdapat di BP2D, tetapi setelah dilakukan wawancara kepada BP2D ternyata tidak ada litbang atau penelitian kepada koperasi.

Jadi, pengukuran dilakukan hanya melalui evaluasi setelah acara selesai. Bahkan dibidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Provinsi Jawa Barat ada yang tidak melakukan post test, tidak ada pembinaan dan pemantauan atau monitoring kembali setelah fase pembinaan yang telah diberikan. Dan dari hasil wawancara terhadap koperasi juga terdapat koperasi yang tidak mengikuti prinsip-prinsip koperasi, seperti menetapkan bunga yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat khususnya Badiklatkop berperan dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan, dengan cara memberikan pelatihan tentang perkoperasian; Penekanan pada manajemen berupa: pembinaan sumber daya manusia, melalui program-program yang dibuat oleh Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan, serta Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; berperan dalam aspek permodalan berupa hibah uang dan non uang yang diberikan secara kredit yang diajukan melalui KUR BRI,BTN dan Bank Mandiri; namun demikian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat kurang berperan dalam melakukan *action research*, karena tidak mempunyai

data riset koperasi. Dengan demikian hasil-hasil pembinaan tidak dapat diukur secara ilmiah dan terstruktur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis, sehingga telah diberikan kesempatan untuk mengambil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. 2018. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286–1295.
- Burhanudin, B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Deding Ishak, Dedeng Yusuf Maolani, E. E. 2017. Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 101–120.
- Engkus, E. 2018. Implementasi undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Litigasi*.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>
- Hamalik, O. 2011. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamalik, Oemar. 2011. Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. In *Proses Belajar Mengajar*.
- Lestari, F. D., & Kholil, M. 2018. Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Privat Law*, 6(1), 46–59.
- Suparman., N., Chandra, D., Sari, A. (2019). Bureaucratic Behavior in the Implementation of Capital Expenditure Budget in the office of Public work and Spatial of Sumedang Regency. *Jurnal Bina Praja*, 11 (1), 99–109.
- Nasution, C., & Thamrin, H. 2016. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(2), 105–119.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawaty, I., & RFS, H. T. (2014). Pelaksanaan Pembinaan Koperasi. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(3), 317–322.
- Toha, M. 2003. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.